

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah dalam arti sungguh-sungguh melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah itu bisa berupa ibadah *mahdhah* dan bisa juga ibadah *ghairu mahdhah*. Kedua macam ibadah ini pada dasarnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Melaksanakan kedua ibadah tersebut secara utuh dan saling mendukung untuk mencapai keridhoan Allah adalah tujuan hidup seorang muslim.¹

Didalam ajaran Islam menjadi keharusan setiap individu untuk bermanfaat bagi dirinya dan orang di sekelilingnya. Berbisnis, berekonomi atau berindustri dengan segala macam aktivitasnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun praktik bisnis, berekonomi atau berindustri yang sesuai dengan syariat Islam masih belum optimal diterapkan, sekalipun oleh umat Islam. Banyak penyebabnya, diantaranya adalah masih banyak dari kaum muslim yang belum tahu atau belum paham tentang aturan syariat mengenai cara berbisnis, berekonomi atau berindustri yang sesuai dengan syariat Islam.² Dalam perekonomian islam terdapat dua persoalan penting yang perlu dipelajari dan dikaji sampai tuntas dari beberapa segi. Yaitu dua pokok persoalan yang kontradiksi, satu bersegi positif dan satu lagi bersegi negatif, satu merupakan kewajiban bahkan rukun diantara lima rukun Islam sedangkan yang satu lagi

¹ Amin Azis, *Memahami dan Mendalami Ajaran Al-Qur'an*, Pinbuk Press, 2004. Hml 10

² Yan Orgianus, *Moralitas Islam Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, Marja, 2012. Hlm 29

sesuatu yang haram bahkan salah satu diantara tujuh dosa yang sangat besar. Pertama adalah zakat dan yang kedua adalah riba. Orang yang mengingkari bahwa yang pertama itu sesuatu yang wajib, sedangkan yang kedua sebagai sesuatu yang haram untuk dikerjakan. Persoalan mengenai riba sudah memperoleh banyak perhatian dan penggarapan yang jauh lebih banyak dari pada persoalan mengenai zakat.

Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi zakat cukup besar. Sedangkan berdasarkan perhitungan FOZ (Forum Zakat) potensi zakat di Indonesia mencapai 17,5 triliun rupiah per tahun dan yang disalurkan melalui lembaga pengelola zakat hanya 350 milyar rupiah per tahun. Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005 menyebutkan bahwa potensi zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf di Indonesia mencapai 19,3 triliun rupiah per tahun. Angka-angka tersebut akan semakin bertambah dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk membayar zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf, karena saat ini membayar zakat, dan berinfaq telah menjadi *life style* bagi umat Islam di Indonesia sejak maraknya kajian-kajian tentang keajaiban dan keutamaan berzakat dan berinfaq.³

Pelaksanaan zakat diberikan melalui Lembaga Amil Zakat didasarkan pada beberapa pertimbangan: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin zakat. Sebaliknya apabila pelaksanaan zakat itu diberikan oleh muzakki sendiri,

³Sugiono, [http://www.infobanknews.com/2010/11/bank-bank-syariah-berburu-berkah-dana-zakat/diakses 3-11-2014 jam 14:00 WIB](http://www.infobanknews.com/2010/11/bank-bank-syariah-berburu-berkah-dana-zakat/diakses%203-11-2014%20jam%2014:00%20WIB)

maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai kecakapan, keakuratan dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang islami⁴. Pendistribusian zakat berarti pendistribusian rizky, zakat merupakan salah satu upaya meringankan beban hidup bagi kaum yang lemah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan hidup didunia. Sistem distribusi zakat secara tepat kepada *mustahiq* dan penentuan *mustahiq* adalah modal utama untuk menekan kesenjangan kelompok kaya dan miskin.

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomer 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan keputusan direktoral Jenderal Pembimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Namun pada tahun 2011 terjadi perubahan undang-undang pengelolaan zakat dikarenakan banyaknya penyelewengan zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dikelola oleh sebagian masyarakat yang tidak menggunakan badan hukum. Adapun perubahan dalam undang-undang ini antara lain : perubahan nama menjadi UU Zakat, Infak dan Sedekah, posisi pemerintah

⁴ Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, hlm. 122

dan atau badan zakat pemerintah (BAZNAS) lebih tinggi, pengelola zakat hanya yang diberi izin saja yang boleh mengelola zakat, LAZ yang diatur dalam 13 pasal, LAZ dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam, Adanya otoritas tunggal pengelolaan zakat, yaitu pemerintah (BAZNAS), Adanya dualisme pengelolaan zakat (pemerintah dan masyarakat) BAZNAS dan LAZ. Perubahan ini mempunyai dampak yang besar bagi perkembangan BAZNAS dan LAZ di Indonesia dengan membuat stand Gerai zakat atau kantor pendistribusian zakat melalui stero langsung ataupun dikirim secara non-tunai. Secara faktual LAZ (lembaga amil zakat) berkembang menjadi LAZNAS (lembaga amil zakat nasional), hal ini dilihat dari berkembangnya masyarakat yang percaya terhadap LAZNAS. Salah satunya kota Bandung menjadi tolak ukur perkembangan LAZNAS, dan salah satu LAZNAS di Bandung yang pertumbuhannya sangat pesat adalah LAZNAS DPU DT (Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Darut Tauhid).

Dompot Peduli Ummat (DPU DT) merupakan lembaga nirbala milik masyarakat yang bergerak dibidang penghimpunan (*fundrising*) dan pendayagunaan dana ZIS (zakat, Infaq, Sedekah) serta dana lain yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan ataupun lembaga. DPU DT didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym). Berawal dari rapat pengurus yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) secara profesional, untuk itu diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana ZIS. Berangkat dari hal tersebut, maka yayasan Darut Tauhid memutuskan untuk

mendirikan Dompot Peduli Ummat (DPU). Sesuai dengan Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004 tentang legalitas DPU DT sebagai LAZNAS, SK Gubernur Jawa Barat No. 541/Kep.846-Yanos.2002 tentang pengukuhan DPU DT sebagai LAZDA, SK pengurus yayasan DT no. 09/SK/C/YYS-DT/VIII/08 tentang perubahan organisasi DPU DT, maka lembaga amil zakat nasional DT terdiri beberapa biro; Biro Pengimpunan (Fundraising), Biro Pendayagunaan, dan Biro Sekretariat Lembaga & Operasional.

Berikut adalah beberapa program yang ada di Dompot Peduli Ummat DT :

Tabel 1.1 Tabel Program LAZNAS DPU DT

No	Program	Nasional	Lokal/Cabang
1	Pusat Kemandirian Ummat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program MiSyKat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) 2. Program DTM (Desa Ternak Mandiri) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program SSK (Santri Siap Karya), (DPU Palembang & Lampung) 2. Program PEKA (Pelatihan Kemandirian), (DPU Semarang) 3. Program Klinik Berdikari (DPU Jakarta) 4. Program Budaya Belut (DPU Palembang & Lampung)
2	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ummat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adzkiya Islamic School 2. Beasiswa Prestatif 3. Beasiswa Mahasiswa Mandiri 4. Pelatihan Baby Sitter Mitra Ibu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kursus Bahasa Arab (DPU Yogyakarta) 2. Program Diklat Guru (DPU Pusat) 3. Program Excelent House (DUP Semarang & Bogor) 4. Program Diklat Satpam (DPU Pusat) 5. Program Diklat Bekam (DPU Pusat) 6. Program Adzkiya Kids (DPU Lampung) 7. Program Pengentasan Buta Huruf Al-Qur'an (DPU Pusat) 8. Program Kursus Desain Grafis (DPU Pusat) 9. Program Pelatihan Siswa 10. Program Diklat Janaaiz dan Manajemen Masjid
3	Pusat Sosial dan Kemanusiaan (PUSOSMAN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program MLPK (Mobil Layanan Peduli Kemanusiaan) 2. Program RR (Rescue and Recovery) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program AAM (Anak Asuh Mandiri), (DPU Pusat) 2. Program Lingkungan Barakah (DPU Pusat)
4	Reguler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Ramadhan Peduli Negeri (RPN) 2. Program Kurban Peduli Negeri (KPN) 3. Gempita Muharram 	

Dari tabel diatas dapat dilihat Salah satu kendala yang serius yang dihadapi oleh usaha mikro adalah kurangnya ketersediaan dana. Usaha Kecil Menengah (UKM) yang banyak digeluti oleh masyarakat seperti pedagang di pasar, pengrajin keterampilan, pedagang keliling dan lain-lain, sering kali tidak disentuh oleh kebijakan program pemerintah yang berbentuk program bantuan atau pinjaman dana. Maka dari itu dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana DPU DT menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT)*.

Tujuan misykat sendiri ialah sesuai dengan perintah ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah : 2)

Semangat kebersamaan, persaudaraan dan solidaritas sosial tersebut juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut :

“Rasulullah SAW bersabda : barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada seorang muslim dari suatu kesulitan dunia, maka Allah pasti akan memberikan kelonggaran atas perbuatannya itu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Allah senantiasa menolong hambanya-Nya selama hamba itu mau memberi pertolongan kepada sesamanya.” (HR. Abu Dawud)

Program unggulan MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) di bidang usaha *microfinance* syariah atau lembaga keuangan mikro

syariah telah mampu memberdayakan ekonomi kecil atau menengah kebawah. Akad yang digunakan oleh program MISYKAT antara lain *Murobahah*, *mudhorobah* dan *musyarokah*. Misykat merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha bagi kaum dhuafa.

Secara mekanisme program *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat* (MISYKAT) mulai efektif pada awal tahun 2003. Program ini berbentuk pendidikan/pelatihan usaha dan dana usaha bergulir kepada *mustahiq* zakat yang memiliki usaha atau motivasi usaha, usia 17-45 tahun bertempat tinggal tetap dan lain-lain.⁵ Yang semuanya itu perlu adanya manajemen dan pengelolaan yang baik. Sejak tahun tersebut ada beberapa pembiayaan yang dilakukan oleh DPU DT melalui program Misykat diantaranya perluasan kerja sama dengan kaum dhuafa. Sesuai dengan tujuan MISYKAT maka DPU DT serta kaum dhuafa mengadakan kerja sama dengan menggunakan *akad Mudharabah*, *musyarakah murabahah*, dan *Qardhul hasan*. Kaum dhuafa yang mendapatkan modal dari Misykat lantas diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri.

Namun sebelumnya, kaum dhuafa yang terpilih itu terdiri dari beberapa orang dalam 1 kelompok, yang biasanya terjadi dalam 1 kelompok terdapat 10 orang, dimana modal yang diberikan oleh DPU DT ditanggung oleh kesepuluh orang tersebut dengan resiko tertentu. Kelompok tersebut diharuskan terlebih dahulu mengajukan dan mengikuti pembekalan untuk mengelola uang yang akan diterimanya nanti. Mereka tiap pekan mengikuti kegiatan pendampingan yang

⁵ Iwan Rudi Saktiawan, *Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Darut Tauhid*, Bandung: DPU DT Press. 2006, hlm. 7

dipandu oleh salah seorang staff Misykat. Selain mendapatkan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan juga ada pengetahuan kerohanian (agama) untuk memotivasi mereka. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari Misykat, lantas mereka diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan setiap aktivitasnya itu. Mereka yang menjadi anggota Misykat ini punya kewajiban untuk membantu berjalannya program-program pemberdayaan yang dikembangkan Misykat.

Pada skema diatas dijelaskan bahwa pedagang atau penerima modal dari program MISYKAT harus lah mempunyai keahlian. Sebagaimana yang terjadi di kaum dhuafa dimana 1 kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang diberikan pembiayaan oleh DPU DT rata-rata sudah mempunyai keahlian. Pada awalnya mereka mengikuti tahapan-tahapan yang sudah di rencanakan oleh DPU DT, setelah mengikuti beberapa tahapan-tahapan atau pelatihan-pelatihan, kemudian mereka dibina untuk bagaimana caranya agar membuka usaha yang menguntungkan agar bisa menjadi penyokong dana atau *muzakki* sebagaimana tujuan utama dari program pembiayaan MISYKAT yaitu menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki. Setelah dibina tahap ke 3 adalah mereka diberikan modal dengan konsekuensi mereka diharapkan untuk melaporkan setiap aktivitas yang terjadi di usaha yang mereka jalankan, namun menurut Ketua Program Misykat yaitu Bapak Iwan pada kenyataannya kelemahan program misykat yaitu keuntungan tidak maksimal dan para anggota sering mangkir untuk pembinaan setiap minggu serta tidak melaporkan setiap aktivitas atau kegiataannya kepada DPU DT dari kaum dhuafa yang terdiri dari pedagang kaki lima, para petani serta

pedangang asongan lainnya. Kendala tersebut adalah yang dihadapi dari pendamping misykat antara lain:

1. Usahnya macet sementara dana modal usaha sudah diberikan
2. Perkembangan usaha yang lambat
3. Penyalahgunaan dana

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **PENGARUH PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN MISYKAT TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN MODAL DI LAZNAS DPU DT (Studi Komparatif antara Nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah pada :

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT?
2. Bagaimana tingkat pengembalian modal pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan nasabah penerima Kab. Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pengembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT?
4. Bagaimana perbedaan pelaksanaan pendampingan antara Nasabah penerima Kab. Bandung dengan nasabaha penerima Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari LAZNAS DPU DT tentang proses pendampingan pada pembiayaan *Microfinanace Syariah Berbasis Masyarakat* (MISYKAT) antara kaum dhuafa yang terdiri dari pedagang kaki lima dan pedagang asongan dengan LAZNAS DPU DT, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT.
2. Untuk mengetahui tingkat pengembalian modal pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pengembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung.
4. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pendampingan antara Nasabah penerima Kab. Bandung dengan nasabaha penerima Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis, Kegunaan penelitian bagi penulis adalah sebagai sarana menambah pengetahuan dan mendapat gambaran bagaimana pendampingan

proses pembiayaan pada program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat di LAZNAS DPU DT.

2. Bagi LAZNAS DPU DT khususnya program pembiayaan Misykat , diharapkan memberikan masukan, saran, serta bahan informasi sebagai hasil dari penelitian dalam meningkatkan kinerja Lembaga Amil Zakat Nasional DPU DT.
3. Bagi Akademi, penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Pengertian Pendampingan

Islam memandang bahwa hidup bermasyarakat saling kenal mengenal adalah suatu keharusan. Mustahil manusia dapat hidup terpencil seorang diri atau hanya hidup individu saja. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga sikap tolong menolong menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan setiap muslim diwajibkan untuk memikirkan keadaan masyarakat di sekitarnya. Meski disisi lain Islam mengakui hak individu (HAM), bukan berarti seorang muslim boleh lepas tanggung jawab di dalam kehidupan bersama. Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan mencintai sesama.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ }

"Tidaklah beriman seseorang diantara kalian hingga ia (dapat) mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (HR. Bukhari).

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang haruslah hidup berdampingan dan saling tolong menolong. Tidak bisa manusia hanya hidup berindividu saja.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembiasaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang menguasai, mengendalikan serta mengontrol. Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh dan untuk anggota kelompok. Dalam rangka pendampingan ini maka hubungan yang dibangun pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif. Dengan adanya hubungan tersebut, maka peran pendamping dapat diukur melalui 3 hal (BPKB Jawa Timur, 2001):

1. Fasilitator (Mengkoordinasi), fasilitator adalah menjadi pemandu proses. Selain berperan sebagai pemandu proses, Fasilitator memiliki peran penting lainnya sebagai Tool Giver atau pemberi alat bantu. Untuk memudahkan sebuah proses mencapai tujuannya, fasilitator bisa menciptakan

atau membuat alat-alat bantu sederhana agar proses dialog atau diskusi menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

2. Pemotivasi (motivator), Menurut David B. Guralnik, dalam Dasar-Dasar Motivasi (Moekijat : 2002):

“motive is an inner drive, impulse, etc, that causes one to act”. Motif adalah suatu perangsang dari dalam, suatu gerak hati, dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu).

Sedangkan menurut BPKB Jatim (2007), Motivator adalah peran untuk menyadarkan dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan permasalahan itu.

3. Katalisator (Penghubung/pendorong), orang-orang yang menjadikan segalanya terlaksana. Seorang katalisator akan membantu anggota tim lain untuk saling mendukung dan memberi semangat. Dalam pendamping dalam hal ini dapat dengan melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan dengan lembaga diluar kelompok maupun lembaga teknis lainnya, baik lembaga teknis pelayanan permodalan maupun pelayanan keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan

Karjono mengatakan, seperti yang dikutip oleh Ismawan bahwa pendampingan adalah suatu strategi (cara untuk mencapai tujuan) dimana hubungan antara pendamping dengan yang didampingi adalah hubungan dialogis (saling mengisi) diantara dua subjek. Diawali dengan memahami realitas masyarakat dan memperbaharui kualitas realitas kearah yang lebih baik.⁶

⁶ Ismawan Bambang, Pamuji, Otok S., *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal*, (Jakarta: PT Penebar Swadata, 1994), h. 40.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Pendampingan sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan usaha dengan memperluas pengetahuan tentang bagaimana mempergunakan sumber daya dengan efektif dan efisien. Pendampingan di sisi lain bisa menjadi salah satu bentuk manajemen resiko bagi lembaga keuangan. Dengan melakukan pendampingan, dana yang mereka kucurkan lebih aman karena mereka tahu pasti kemana dan bagaimana dana mereka diusahakan dan dikelola.

1.5.2 Tingkat Pengembalian Modal

Definisi tingkat pengembalian modal (return) menurut Ardiyos (2001:233)

“adalah hasil yang diperoleh dari penanaman modal tertentu didalam suatu perusahaan didalam periode tertentu”.

Sedangkan menurut Tandelilin (2001:48) :

“adalah hasil yang diperoleh dari aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi dengan perubahan harga sekuritas”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat pengembalian modal (return) merupakan suatu hasil atau profit yang diperoleh seorang investor dalam hal ini DPU DT dengan cara menanamkan modalnya kepada nasabah penerima modal untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.

1.5.3 Pengaruh Pendampingan terhadap Tingkat Pengembalian Modal

1.5.3.1 Landasan Konseptual

Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan pendampingan sosial sebagai suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan pekerjaan dan fasilitas pelayanan publik lainnya⁷. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan dan penguatan (*empowerment*)⁸.

Berkaitan dengan pengertian pendampingan diatas, Ismawan mengatakan bahwa pendamping adalah orang yang bertugas untuk mewujudkan kelompok swadaya masyarakat yang sukses dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan anggota, menghidupkan kembali dinamika kelompok dan usaha produktif anggota⁹. Dalam kaitannya dengan pendampingan pembiayaan Misykat yang dilakukan dengan LAZNAS DPU DT, maka LAZNAS DPU DT bertindak sebagai pendamping yang mendampingi pengusaha mikro yang melakukan pembiayaan MISYKAT yang bersangkutan.

Suatu kelompok perlu didampingi, difasilitatori karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping haruslah mendampingi kelompok tersebut. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping, pendamping hanyalah berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara

⁷ Lihat Departemen Sosialis RI, *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan (Program pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2006-2010)*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2005), H. 14.

⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, (Jakarta: FEUI Press, 2003), h. 96.

⁹ Bambang, dkk., *LSM dan Program Inpres Desa Tertinggal*, h. 30.

bersama-sama dalam kelompok tersebut, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah sampai kepada implementasi dalam usaha untuk mengembaliak tingkat pengembalian modal.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan program pendampingan efektif untuk meningkatkan pengembalian modal bagi Nasabah penerima modal, sehingga dapat membantu memenuhi kehidupan keluarganya. Untuk melihat adanya pengaruh atau tidaknya pendampingan yang dilakukan oleh DPU DT, maka perlu adanya kontrol yang berkesinambungan dari pendamping. Sehingga nantinya kinerja UKM dapat terpantau dan terukur. Selain itu harus ada nasabah penerima modal mengalami masalah, maka pendamping menjadi tempat untuk pemberian solusi dari permasalahan tersebut. Dalam proses pendampingan ini juga memerlukan media yang dapat mempermudah penyampaian materi dan solusi, serta pemahaman dari pengusaha kecil. Diharapkan semua usaha pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan tingkat pengembalian modal nasabah penerima usaha mikro tanpa ada kekurangan atau terjadi pembiayaan macet.

1.5.3.2 Landasan Empiris

Berikut adalah hasil penelitian terkait dengan Pendampingan dengan Tingkat Pengembalian Modal :

Tabel 1.2 Review Riset Sebelumnya

No	Judul Skripsi	Penulis	Kesimpulan Skripsi
1.	Efektifitas Program Pendampingan Terhadap Peningkatan Laba Usaha Bagi Pengusaha Wanita Skala Mikro di Rumah Zakat Cabang Bandung	Arifin Ihsan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung	Dengan menggunakan 4 metode AIDA pendampingan yang dilakukan sangat efektif dilihat dari attention 26.7%, Interest 66.6%, desire 100% serta action yang dilakukan Rumah Zakat Bandung dalam menjalankan pendampingan sangatlah baik sehingga banyak responden yang mengikuti program pendampingan melakukan saran dan solusi yang dilakukan oleh pendamping. Peningkatan laba usaha Pengusaha wanita usaha Mikro pun setelah mengikuti pendampingan usaha mengalami peningkatan laba sebesar 15%-80%.
2.	Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan dan Pendampingan Usaha Terhadap Kinerja Usaha Mustahiq (Studi pada Rumah zakat Indonesia Kota Bandung)	Hendrati Dwi Mulyaningsih Program Magister Manajemen studi Manajemen Konstrentasi Manajemen Kewirausahaan Universitas Islam Bandung	Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Rumah Zakat terhadap kinerja mustahiq dapat memberikan kontribusi yaitu sebesar 20%, sedangkan yang lainnya dipengaruhi oleh kompetensi kewirausahaan yaitu sebesar 71%. Dalam tesis ini pengukuran pendampingan menggunakan metode Stimulasi, Fasilitator serta Konsultasi.
3.	Efektifitas Pendampingan Usaha Mikro Dalam Peningkatan Return Pada Pembiayaan Mudharabah : Studi pada BMT Ta'awun	Indra Lesamna Hadinata Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Jakarta	Dalam penelitian ini penulis pengukuran pendampingan menggunakan metode Motivasi, pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan dan Konsultasi serta Monitoring dan evaluasi, dengan menggunakan pengukuran tersebut dikatakan bahwa pendampingan yang dilakukan BMT Ta'awun terbukti efektif dengan kemajuan manajemen, kinerja keuangan dan laporan yang akhirnya berdampak pada peningkatan Return.

1.6 Hipotesis

Hipotesis berarti mengarahkan pada suatu bentuk penyelidikan empiris untuk menetapkan apakah hipotesis ini didukung atau disanggah oleh apa yang diamati oleh peneliti.¹⁰ Sebagai asumsi awal atas masalah ini, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

“Terdapat pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pengembalian modal”.

“Terdapat Perbedaan Pelaksanaan Pendampingan antara Nasabah Penerima Kab. Bandung dan Kota Bandung”.

1.7 Metode dan Teknik Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian konklusif dan Metode komparatif. Jenis riset deskriptif dan kausal sering disebut sebagai riset konklusif karena kedua riset ini berusaha memberikan kesimpulan akhir (conclusion) dari hasil temuannya.¹¹ Sedangkan Metode komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, dimana penulis membandingkan bagaimana pelaksanaan pedampingan antara Nasabah penerima modal pembiayaan Misykat Kota Bandung dan nasabah penerima modal pembiayaan Misykat Kab. Bandung.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan. Penelitian kausal berguna untuk

¹⁰ Black dan Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Eresco, Bandung 1992, hlm. 124

¹¹ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.33

menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel memengaruhi variabel lainnya.¹².

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena Pembiayaan Misykat yang dilakukan oleh LAZNAS DPU DT pada saat riset dilakukan, lalu menganalisis pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas dengan menggunakan analisis data statistik, sehingga didapatkan kesimpulan akhir dari hasil penelitian. Serta membandingkan bagaimana pelaksanaan pedampingan antara nasabah penerima Kota Bandung dengan nasabah penerima Kab. Bandung.

1.7.2 Populasi dan Sampel

1.7.2.1 Populasi

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa atau apapun yang menjadi objek dari survei. Agar lebih operasional (bisa dihitung, bisa diukur), populasi harus didefinisikan secara jelas & spesifik. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah penerima pembiayaan misykat baik kota Bandung maupun Kab. Bandung yang berjumlah 3000 orang baik nasabah penerima yang berdomisili Kota Bandung maupun nasabah yang berdomisili Kab. Bandung.

1.7.2.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja. Dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang

¹² Husein Umar, *Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.105

diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.¹³

Metode ini pula merupakan metode penentuan sampel yang difokuskan pada target yang memiliki kriteria tertentu. Dalam hal ini kriteria ditentukan guna memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terkait penyaluran pembiayaan *MISYKAT* yang dilaksanakan oleh LAZNAS DPU Daarut Tauhid Kota Bandung dalam meningkatkan tingkat pengembalian modal. Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut :

1. Nasabah Misykat yang beralamat di Kota Bandung
2. Nasabah Misykat yang beralamat di Kabupaten Bandung
3. Nasabah MISYKAT dari LAZNAS DPU Daarut Tauhid yang aktif selama periode penelitian berlangsung.

Berdasarkan beberapa kriteria di atas, maka atas dasar rekomendasi dari pihak manajemen DPU Daarut Tauhid Kota Bandung, nasabah MISYKAT yang sesuai dengan kriteria di atas untuk dijadikan sampel penelitian ditentukan berjumlah 50 orang terdiri dari 25 orang Nasabah Misykat yang beralamat di Kota Bandung dan 25 orang Nasabah Misykat yang beralamat di Kabupaten Bandung.

1.7.3 Data, Jenis Data, Sumber Data

1.7.3.1 Data

1. Guna menjawab perumusan masalah nomor satu (bagaimana pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT), peneliti

¹³ Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, P.T. RajaGrafindo Persada, 1994 : Hal.41

memerlukan data tentang pelaksanaan pendampingan pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT yang didapatkan melalui Kepala/Direktur Misykat.

2. Guna menjawab rumusan masalah nomor dua (bagaimana tingkat pengembalian modal pembiayaan misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan nasabah penerima Kab. Bandung) peneliti memerlukan data tentang tingkat pengembalian modal antara nasabah penerima kota Bandung dengan nasabah penerima Kab. Bandung.
3. Guna menjawab rumusan masalah nomor tiga (bagaimana pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pengembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT bagi nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung), peneliti memerlukan data tentang pengaruh pendampingan pembiayaan misykat terhadap tingkat pengembalian modal misykat di LAZNAS DPU DT bagi Nasabah penerima Kota Bandung dan Nasabah Penerima Kab. Bandung, yang didapatkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada nasabah penerima modal.

1.7.3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

1.7.3.3 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data berasal dari hasil kuesioner dan wawancara yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian. Kuesioner dibagikan kepada nasabah penerima modal sesuai dengan sampling yang ditentukan, Sedangkan wawancara dilakukan pada pihak LAZNAS DPU DT serta Nasabah Kota dan Kab Bandung yang berkaitan dengan pembiayaan misykat.
2. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal, artikel, website maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.7.4 Operasional variable

Operasionalisasi variabel adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel/konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau mengukur variabel tersebut.¹⁴ Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang terkandung yaitu :

- a. Variabel bebas (*independent variable*) atau variabel X adalah pengaruh pendampingan pembiayaan misykat antara nasabah Kota Bandung dengan nasabah Kab. Bandung.

¹⁴Singarimbun, Masri, dkk. *Metode Penelitian Survei*. 1983, LP3ES, Yogyakarta.

- b. Variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel Y adalah Tingkat pengembalian modal antara nasabah Kota Bandung dengan nasabah Kab. Bandung.

Tabel 1.3 Operasional Variabel

Konsep	Sub Variabel	Indikator	Skala Ukur
Pengaruh Pendampingan Pembiayaan Misykat (X)	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitator (Mengkoordinasi) 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu mengontrol kualitas barang dan jasa yang dihasilkan Keterlibatan dalam proses usaha Membantu membuat perencanaan usaha Memberikan arahan atau bimbingan tentang tanggung jawab terhadap anggota serta barang produksi yang dihasilkan Mengkoordinasikan nasabah baik yang bersifat manusiawi maupun non manusiawi 	ORDINAL
	<ul style="list-style-type: none"> Motivator (Memotivasi) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kunjungan rutin Memberikan motivasi Memberikan pelatihan Membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan Membantu mencari solusi alternatif ada masalah 	ORDINAL
	<ul style="list-style-type: none"> Katalisator (Penghubung) 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak luar 	ORDINAL

		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama • Mendorong/menghukung kegiatan kolektif • Mendorong pelaksanaan tugas dan proses usaha • Membantu menghubungkan dengan pihak luar yang bisa membantu proses usaha 	
Tingkat Pengembalian Modal (Y)	Tingkat dimana nasabah bersikap Positif terhadap Pendamping Pembiayaan Misykat sehingga tidak menimbulkan pembiayaan macet ataupun kecurangan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Penyetoran modal perpekan secara teratur • Nasabah dikategorikan dalam : <ol style="list-style-type: none"> 1. L lancar (L) : Penyetoran hari H 2. Kurang lancar (KL) : H+1-H+30 3. Diragukan Macet (DM) : H+31-H+60 4. Macet (M) : H+61 	

1.7.5 Intrument Penelitian dan Pengujian Alat Ukur

1.7.5.1 Intrument Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif.¹⁵Jenis instrumen yang digunakan penulis antara lain:

¹⁵ Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metode Peniltian Kuantitatif dalam pendididka*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 1996, hlm.160.

1. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara penulis dengan orang-orang yang mempunyai keterlibatan dalam penulisan penelitian ini, guna memperoleh data atau kejelasan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penelitian. Adapun orang-orang yang penulis wawancarai adalah pihak LAZNAS DPU DT serta nasabah penerima modal Pembiayaan Misykat di Kota Bandung dan Nasabah penerima Modal di Kab. Bandung.

2. Kuisisioner

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dalam hal ini yaitu nasabah penerima modal Pembiayaan Misykat di Kota Bandung dan Nasabah penerima Modal di Kab. Bandung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang diambil dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh LAZNAS DPU DT yang berkaitan dengan pengaruh pendampingan serta tingkat pengembalian modal di Kota Bandung dan Kab. Bandung dan literature yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

1.7.5.2 Pengujian Alat Ukur

1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji keabsahan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan rumus korelasirank spearman, tujuannya untuk menghitung korelasi antara masing masing pertanyaan

dengan skor total. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertanyaan mana yang valid dan mana yang tidak valid.

Menurut Masrun yang dikutip oleh Sugiono menyatakan bahwa “item yang mempunyai korelasi positif dengan kriteria (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukkan item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Apabila alat ukur tersebut berada $< 0,3$ (tidak valid) dan $> 0,3$ (valid)”.¹⁶ Pengujian statistik mengacu pada kriteria:

- r hitung $< r$ kritis maka tidak valid
- r hitung $> r$ kritis maka valid.

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara variabel/item dengan skor total variabel. Cara mengukur validitas yaitu dengan mencari korelasi antar masing-masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

Di mana:

r_s = Koefisien Korelasi Spearman

$\sum d^2$ = Total Kuadrat slisih antar ranking

n = Jumlah Sampel Penelitian

¹⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 124

2. Uji reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui adanya konsistensi alat ukur dalam penggunaannya, atau dengan kata lain alat ukur tersebut mempunyai hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian ini dilakukan dengan teknik belah dua, dengan langkah kerja sebagai berikut:

- a. Membagi pertanyaan menjadi belah dua yaitu item ganjil dan genap.
- b. Skor untuk masing-masing pertanyaan pada tiap belahan dijumlahkan sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.
- c. Mengkorelasikan skor total satu dengan skor total dua dengan korelasi rank spearman.
- d. Mencari reliabilitas untuk keseluruhan pertanyaan dengan rumus Spearman Brown.

$$r_1 = \frac{2r_{AB}}{1 + r_{AB}}$$

(Sumber : Sugiyono, 2009:186)

Dimana :

r_1 = Reliabilitas internal seluruh instrument

r_{AB} = Korelasi *Product Moment Pearson* antara item ganjil dan genap

1.7.6 Bentuk Instrument

Berdasarkan hasil operasional variabel, diperoleh skala data variabel independen dan skala data variabel dependen adalah skala ordinal. Oleh karena

itu, bentuk penelitian menggunakan skala linkert, dimana setiap instrumen mempunyai gradasi dari segi sangat positif sampai sangat negatif.

Tabel 1.4 Skala Ordinal

Ukuran	Skala
Pengaruh Pendampingan	
Tidak Pernah	1
Jarang	2
Cukup	3
Sering	4
Selalu	5

1.7.7 Teknik Analisis data

1.7.7.1 Pengujian Hipotesis Satu : Pengaruh Pendampingan Pembiayaan

Misykat terhadap Tingkat Pengembalian Modal

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diakumulasikan dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan 2 teknis sebagai berikut :

1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹⁷ Teknik analisis statistik deksriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan jawaban responden atau sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner ke dalam tabel tunggal maupun tabel silang, sehingga memudahkan dan memperjelas analisis.

2. Teknik Statistik Pengujian Hipotesis

Analisis statistik pengujian hipotesis diajukan untuk mencari koefisien antara variabel bebas dan variabel terikat untuk kemudian di uji apakah hipotesis-hipotesis termasuk signifikan pada H0 dan H1. Penelitian ini menggunakan uji statistik Rank Spearman.

$$r = \frac{N \left(\sum_{i=1}^N X_i Y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^N X_i \right) \left(\sum_{i=1}^N Y_i \right)}{\sqrt{\left[N \sum_{i=1}^N X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N X_i \right)^2 \right] \left[N \sum_{i=1}^N Y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N Y_i \right)^2 \right]}}$$

Di mana:

r : Koefisien korelasi

X : Skor tiap pertanyaan/item

Y : Skor total

N : Jumlah responden

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana yang akan dibentuk adalah :

$$Y = a + bX$$

¹⁷Idem

Keterangan :

Y = Nilai prediksi untuk variabel Tingkat pengembalian Modal

a = Konstanta, besar nilai Y jika $X = 0$

b =Arah koefisien regresi yang menyatakan perubahan nilai Y ketika terjadi perubahan pada nilai X

X = Variabel X

4. Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk melihat besar kontribusi pengaruh dalam bentuk persentase (%) yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y .

5. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk mengetahui apakah pendampingan pembiayaan misykat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian modal antara Kota Bandung dengan Kab. Bandung, Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol H_0 dan hipotesis alternatif H_1 ¹⁸. Adapun rumusan hipotesisnya yaitu:

1. H_0 : $\beta = 0$, tidak terdapat pengaruh antara variabel pengaruh pendampingan pembiayaan misykat dengan tingkat pengembalian modal pada LAZNAS DPU DT.

¹⁸ Ety Rochayety, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), Hlm. 108.

2. H_1 : $\beta \neq 0$, terdapat pengaruh antara variabel pengaruh pendampingan pembiayaan misykat dengan tingkat pengembalian modal pada LAZNAS DPU DT antara nasabah penerima Kota Bandung dengan nasabah penerima Kab. Bandung.

1.7.7.2 Pengujian Hipotesis Dua : Terdapat Perbedaan Pelaksanaan Pendampingan antara Nasabah Penerima Kab. Bandung dengan Kota Bandung

Pengujian Hipotesis kedua ini adalah dengan menggunakan Uji Beda yaitu Untuk menilai perbedaan pelaksanaan pendampingan nasabah pembiayaan Misykat terhadap pengembalian modal nasabah di LAZNAS DPU DT antara nasabah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung adalah dengan menggunakan analisa uji beda. Uji Beda Adalah Uji yang dipergunakan untuk mencari perbedaan, baik antara dua sampel data atau antara beberapa sampel data. Dalam kasus di sini adalah bisa mencari perbedaan pelaksanaan pendampingan nasabah pembiayaan Misykat terhadap pengembalian modal nasabah di LAZNAS DPU DT antara nasabah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Uji Beda Statistika menggunakan metode Non Parametrik. Pengujian uji hipotesis dari perbandingan pelaksanaan pendampingan nasabah pembiayaan Misykat terhadap pengembalian modal nasabah di LAZNAS DPU DT antara nasabah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung menggunakan *sample t-Test*, dimana metode *sample t-Test* yaitu *one sample t-Test* Uji hipotesis *t-Test* adalah uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penelitian ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian dan Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, Meliputi Pengertian Pendampingan, Tujuan proses dan pola pendampingan, Tugas dan Peran pendamping, serta tolak ukur pengaruh Pendampingan, Pengertian Pembiayaan, Jenis-Jenis Pembiayaan, Pengetahuan Literalis Tentang Zakat.

Bab III : Objek Penelitian, Meliputi Gambaran Umum LAZNAS DPU DT, Visi dan Misi LAZNAS DPU DT, Program Yang Terdapat Pada LAZNAS DPU DT, praktek pola pendampingan pada pembiayaan Misykat, Struktur Organisasi Dan Operasional Pendampingan Pembiayaan Misykat.

Bab IV : Analisis Pengaruh Pendampingan Pembiayaan Misykat Terhadap Tingkat Pengembalian Modal di LAZNAS DPU DT antara Nasabah Penerima Kota Bandung dengan Nasabah Penerima Kab. Bandung.

Bab V : Kesimpulan dan Saran